

PDRB SEKTORAL, HARGA BERAS, DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI KEBIJAKAN SWASEMBADA PANGAN DI PROVINSI RIAU

*(GDP by Sector, Rice Price, and Poverty Alleviation through
Self-Sufficiency Policy in the Province of Riau)*

Ariesy Tri Mauleny*

Nidya Waras Sayekti**

Naskah diterima: 20 Maret 2012

Naskah diterbitkan: 22 Juni 2012

Abstract

The Province of Riau has abundant natural resources. However, this province is still not able yet to eradicate number of its poor population as well as food crisis. This research paper is aimed to analyse the influence of GDP, rate of rice price, and poverty line based on the data collected in 2005-2009 by using panel data regression estimation methods. The result shows that while the aggregate GDP has positive influence on the prevalence on poverty, GDP rate by agriculture and gas sector has contradictive effects on poverty line. Meanwhile, unlike gas sector, the rate of rice price has negative influence on the prevalence of poverty. In addition, GDP by agriculture sector has negative effect on eradication of poverty line such as in municipalities of Kuantan Singgigi, Indragiri Hulu, Rokan and Kampar

Keywords: GDP, rice price, self-sufficiency food policy, poverty in Riau Province

Abstrak

Provinsi Riau dikenal sebagai daerah yang kaya keragaman sumber daya alam namun belum bisa melepaskan diri dari kemiskinan dan ancaman krisis pangan. Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui pengaruh antara PDRB, harga beras, dan kemiskinan dengan menggunakan data tahun 2005-2009 dan metode estimasi regresi data panel *fixed effect* untuk setiap kabupaten/kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara agregat PDRB sektor pertanian dan migas saling bertentangan pengaruhnya terhadap kemiskinan di mana sektor pertanian berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, sektor migas berpengaruh positif terhadap kemiskinan, sementara harga beras berpengaruh negatif terhadap prevalensi kemiskinan. Apabila dilihat per daerah, maka kabupaten yang memiliki tanda *fixed effect cross* positif di mana PDRB sektor pertanian negatif adalah Kuantan Singgigi, Indragiri Hulu, Rokan Hulu, dan Kampar.

Kata kunci: PDRB sektoral, harga beras, kebijakan swasembada pangan, kemiskinan Provinsi Riau

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia yang diakui secara universal menjamin bahwa setiap orang berhak untuk menikmati kehidupan yang layak dan terbebas dari kemiskinan. Hal ini juga diatur dalam konstitusi sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yaitu "*Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*" Dengan demikian hidup layak dan terbebas dari kemiskinan merupakan hak yang harus dipenuhi negara dan Pemerintah bertugas untuk mewujudkannya melalui pembangunan ekonomi nasional.

Pembangunan nasional pada dasarnya merupakan proses konstruktif suatu wilayah sehingga dapat mencapai keadaan yang lebih baik, setelah proses tersebut terlaksana. Pembangunan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat yang tercermin dalam perbaikan tingkat hidup.¹ Hal tersebut sesuai dengan beberapa pasal yang terkandung dalam konstitusi Indonesia bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk memakmurkan rakyat.

Upaya mengurangi penduduk miskin secara nasional telah diupayakan melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah, swasta, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Program penanggulangan kemiskinan yang bersifat sektoral dilakukan oleh Pemerintah, sementara LSM melalui program pengembangan masyarakat, dan untuk swasta lebih dikenal dengan program kemitraan. Setiap instansi atau lembaga masing-masing memiliki kriteria tertentu mengenai kemiskinan

* Alamat penulis di P3DI Bidang Ekonomi & Kebijakan Publik, Jl. Jend. Gatot Subroto, Ged. Nusantara 1 Lantai 2, Setjen DPR RI dan email di: ariesy.t.leny@dpr.go.id.

** Alamat penulis di P3DI Bidang Ekonomi & Kebijakan Publik, Jl. Jend. Gatot Subroto, Ged. Nusantara 1 Lantai 2, Setjen DPR RI dan email di: nidya_ws@yahoo.com.

¹ Faturcohan dan M. Molo, *Kemiskinan di Perdesaan Jawa*, (Yogyakarta: Population Studies Centre, Gadjah Mada University Press, 1995), hal. 37.

maupun pola kerja atau pola pengembangan penanggulangannya.²

Perbedaan karakteristik antar wilayah di Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi konsekuensi logis yang tidak dapat dihindari. Karakteristik wilayah memberikan pengaruh kuat pada terciptanya pola pembangunan dan struktur perekonomian, sehingga pola pembangunan ekonomi daerah tidak mungkin dipaksakan untuk diseragamkan. Ketidakteragaman ini berpengaruh pada kemampuan untuk tumbuh akan mengakibatkan beberapa wilayah mampu tumbuh cepat sementara wilayah lainnya tumbuh lebih lambat. Hal ini mendorong terciptanya ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan antar wilayah di Indonesia.³

Provinsi Riau sebagai provinsi yang memiliki sumber daya alam yang besar seperti minyak, gas bumi, dan kelapa sawit yang setiap tahunnya menghasilkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan sumbangan Dana Bagi Hasil (DBH), sudah seharusnya lepas dari permasalahan kemiskinan. Namun, masyarakat Riau dan berbagai daerah penghasil minyak dan gas (migas) justru menuntut keadilan melalui *Judicial Review* Undang-Undang (UU) No. 33 Tahun 2004 tentang Dana Bagi Hasil Migas karena selama ini mereka miskin di tengah-tengah kekayaan migas yang berlimpah. Daerah Riau selama ini hanya memperoleh sebagian kecil dari kekayaan migas. Data 5 tahun terakhir (tahun 2006-2010), volume *lifting* minyak bumi dari Provinsi Riau berjumlah lebih kurang 715,35 juta barel dengan nilai nominal Rp443,18 triliun atau sekitar 40 persen dari volume *lifting* minyak nasional, sementara yang dikembalikan ke daerah Riau hanya 9 persen. Jadi walaupun Provinsi Riau penghasil migas yang besar, ironisnya ada 8 kabupaten/kota yang tingkat kemiskinannya di atas rata-rata nasional.⁴

Komposisi penduduk miskin menurut daerah tempat tinggal di Riau pada Maret tahun 2011 di perdesaan sebesar 70,56 persen, sedangkan di perkotaan sebesar 29,44 persen dari total penduduk miskin. Komposisi ini mengalami pergeseran dimana pada September tahun 2011, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan naik menjadi 71,19 persen dan perkotaan turun menjadi 28,81 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan persentase

penduduk miskin di perdesaan tidak secepat di perkotaan dan didominasi oleh masyarakat yang bergerak di sektor pertanian. Selama Maret tahun 2011-September tahun 2011, garis kemiskinan naik sebesar 4,92 persen, yaitu dari Rp282.479 per kapita per bulan pada Maret 2011 menjadi Rp296.379 per kapita per bulan pada September tahun 2011. Pada periode tersebut, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan. Pada bulan Maret tahun 2011, P1 Provinsi Riau sebesar 1,21, naik menjadi 1,36 pada September tahun 2011, sementara itu P2 pada Maret tahun 2011 sebesar 0,29 naik menjadi 0,39 pada September tahun 2011. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin bergerak menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin makin besar.⁵

Indikasi tersebut dikarenakan sebagian besar penduduk miskin adalah petani yang berada di perdesaan yang memiliki keterbatasan untuk meningkatkan kemampuan daya beli apalagi berinvestasi dalam usaha pertaniannya. Sesuai dengan sensus pertanian tahun 2003, rumah tangga petani di Provinsi Riau sebanyak 596.496 atau 46 persen dari total rumah tangga. Dari jumlah tersebut sebanyak 139.217 (23 persen) merupakan petani gurem yang memiliki luas lahan maksimal 0,5 hektar, sementara sisanya merupakan petani penggarap lahan yang menyewa lahan pertanian milik orang lain.⁶ Oleh karena itu penanggulangan kemiskinan selanjutnya diarahkan pada masyarakat petani sebagai masyarakat pengelola produksi di bidang pangan yang secara tidak langsung mempercepat pemantapan swasembada pangan. Namun hal tersebut seringkali terkendala oleh kebijakan Pemerintah yang belum diarahkan sepenuhnya pada penguatan petani dengan produksinya yang diselaraskan dengan kemampuan dan kapasitas lingkungannya. Adakah hubungan antara PDRB sektoral yang dihasilkan dengan jumlah penduduk miskin di suatu daerah dan bagaimanakah keterkaitan dengan harga beras yang berlaku? Adakah kaitan antara keunggulan sektor migas dengan kemiskinan petani di Provinsi Riau. Bagaimana hubungan antara sektor migas dan sektor pertanian dengan prevalensinya terhadap kemiskinan. Sejauh manakah keberhasilan kebijakan swasembada pangan yang dilakukan Provinsi Riau terhadap upaya penanggulangan kemiskinan?

² Anton Namba, "Pendekatan Ekosistem dalam Penanggulangan Kemiskinan: Refleksi Penanggulangan Kemiskinan di Sulawesi Tengah", (http://www.ekonomirakyat.org/edisi_13/artikel_4.htm, diakses 11 Mei 2012).

³ Mubyarto, "Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia", *Artikel Kemiskinan* – Tahun II No. 2 April 2003, hal. 6.

⁴ Presentasi Soemardhi Thaher di Mahkamah Konstitusi untuk *Judicial Review* UU No. 33 tahun 2004 tentang Dana Bagi Hasil Migas, (<http://www.forumkeadilan.com/forum-utama.php?tid=477>, diakses 11 Mei 2012).

⁵ Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, *Tingkat Kemiskinan Riau September 2011*, (Riau: BPS Provinsi Riau, 2012).

⁶ Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, *Laporan Sensus Pertanian Riau*, (Riau: BPS Provinsi Riau, 2003).

B. Perumusan Masalah

Sebagaimana dipaparkan di atas, maka perumusan masalah dalam kajian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran profil ekonomi dan kemiskinan Provinsi Riau?
2. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap prevalensi kemiskinan?
3. Bagaimana harga beras mempengaruhi prevalensi kemiskinan?

C. Tujuan

Kajian ini bertujuan untuk:

1. Memberikan gambaran profil ekonomi dan kemiskinan di Provinsi Riau secara keseluruhan maupun berdasarkan daerah yang memiliki hasil olah data PDRB negatif terhadap prevalensi kemiskinan di Provinsi Riau.
2. Menjelaskan pengaruh PDRB terhadap prevalensi kemiskinan, baik PDRB total maupun PDRB sektoral, terutama sektor migas dan pertanian untuk melihat apakah sumber daya alam migas yang dimiliki Provinsi Riau memberikan pengaruh positif pada upaya pengentasan kemiskinan atau sumber daya alam tersebut masih terbatas pada "kutukan" sumber daya alam (*resource curse*).
3. Menjelaskan adakah pengaruh kebijakan harga beras terhadap prevalensi kemiskinan di Provinsi Riau memberikan pengaruh positif bagi kesejahteraan petani pangan di samping pemenuhan kebijakan nasional untuk mewujudkan ketahanan pangan.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN EMPIRIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Pembangunan Ekonomi, Produk Domestik Bruto, dan *Resource Curse*

Pembangunan nasional adalah salah satu upaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur melalui pembangunan perekonomian dan mengurangi kemiskinan yang berpegang pada prinsip pemerataan dan keadilan. Sejalan dengan tujuan tersebut, berbagai kegiatan pembangunan telah diarahkan kepada pembangunan daerah khususnya daerah yang relatif mempunyai kemiskinan yang terus naik dari tahun ke tahun. Pembangunan daerah dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek.⁷

⁷ Mohammad J. H, *Membangun Pertanian: Sejarah, Demokratis dan Berkeadilan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009), hal. 16.

Tolok ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Alokasi anggaran pembangunan sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan ekonomi tampaknya perlu lebih diperhatikan. Strategi alokasi anggaran tersebut harus mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menjadi alat untuk mengurangi kesenjangan/ketimpangan regional.⁸

Pembangunan ekonomi sering diukur berdasarkan tingkat kemajuan struktur produksi dan penyerapan sumber daya (*employment*) yang diupayakan secara terencana. Pada era sebelum tahun 1970-an, pembangunan di negara-negara berkembang semata-mata dipandang sebagai fenomena ekonomi *an sich*. Tingkat kemajuan pembangunan pada suatu negara biasanya hanya diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), baik secara agregat maupun per kapita, sesuai dengan teori "efek penetes ke bawah" (*trickle down effect*). Teori *trickle down effect* ini memproyeksikan kemajuan yang diperoleh oleh sekelompok masyarakat yang dengan sendirinya akan menetes ke bawah sehingga menciptakan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi yang pada gilirannya akan menumbuhkan berbagai kondisi demi terciptanya distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi dan sosial secara lebih merata. Dengan demikian tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan unsur yang paling diprioritaskan sehingga masalah-masalah lain dalam membangun masyarakat sering menjadi terabaikan.⁹

Proses akumulasi dan mobilisasi sumber-sumber berupa akumulasi modal, keterampilan tenaga kerja dan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah merupakan pemicu dalam laju pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan. Adanya heterogenitas dan beragam karakteristik suatu wilayah menyebabkan kecenderungan terjadinya ketimpangan antar daerah dan antar sektor ekonomi suatu daerah.

Bertitik tolak dari kenyataan tersebut, kesenjangan atau ketimpangan antar daerah merupakan konsekuensi logis pembangunan dan merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri. Perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan (*backwash effects*) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (*spread effects*) terhadap pertumbuhan daerah, dalam hal ini mengakibatkan proses ketidakseimbangan. Pelaku-pelaku yang

⁸ E. J. Blakely, *Planning Local Economic Development: Theory and Practice*, (California: Sage Publication, Inc. 1989), hal. 139.

⁹ Seth. W Norton, "Economic Growth and Poverty: In Search of Trickle Down", *Cato Journal*, 22(2), 2002.

mempunyai kekuatan di pasar secara normal akan cenderung meningkat bukannya menurun, sehingga akan mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.¹⁰

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana Pemerintah Daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran. Kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹¹

Kemampuan masyarakat untuk memperoleh pendapatan sangat ditentukan oleh sumber daya yang ada baik apa yang ada pada dirinya maupun lingkungan tempat tinggalnya sehingga tercipta lapangan pekerjaan secara langsung atau Pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan. Masyarakat yang bekerja pada sektor pertanian seringkali terbelenggu oleh kemiskinan yang disebabkan oleh lemahnya kemampuan petani dalam pendayagunaan lahan kurang produktif, keterbatasan penguasaan dan penerapan teknologi dan unsur pendukungnya dan prasarana dan permodalan termasuk kelembagaan. Disamping itu juga ada tantangan lahan kurang subur, degradasi lahan, kepemilikan lahan pertanian dan pengalihan lahan. Itulah mengapa sektor pertanian seharusnya menjadi perhatian Pemerintah dalam pengelolaan dan pengembangannya.¹²

Lalu bagaimana dengan Riau sebagai provinsi yang memiliki kesempatan dan kemampuan mengelola sumber daya alamnya untuk menyejahterakan masyarakat atau sekedar menjadi "kutukan sumber daya alam" yang biasanya terjadi pada negara-negara berkembang. Kutukan sumber daya alam atau *resource curse* adalah teori ekonomi yang menjelaskan bagaimana negara-negara yang memiliki sumber daya alam, tidak mampu mengembangkan sumber daya alam tersebut secara baik dan bahkan gagal berkembang di sektor lain. Argumen untuk teori kutukan sumber daya pada ilmu ekonomi pembangunan yaitu suatu negara

cenderung tenggelam dan mengerahkan semua energi dan sumber daya ke dalam pengembangan industri sumber daya alam tertentu tersebut dengan mengabaikan pengembangan pada sektor lainnya, yang menyebabkan serangkaian reaksi berantai yang dapat menghambat pembangunan ekonomi.¹³

Bahkan cenderung menghasilkan kinerja ekonomi yang buruk, menurunkan rata-rata pertumbuhan, karena tingginya tingkat korupsi, pemerintahan yang efektif dan kekerasan politik yang lebih besar serta tidak adanya upaya untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian sumber daya alam, untuk kebanyakan negara miskin dan berkembang dianggap lebih dari sebuah 'kutukan' daripada 'keberkahan'.

2. Harga Pangan dan Kemiskinan

Ketimpangan antara produksi dengan konsumsi pangan menyebabkan fluktuasi harga sehingga memerlukan penyangga produksi dan harga. Munculnya masalah ini dapat disebabkan petani tidak mampu mengendalikan produk pangan dari produksi, distribusi dan pengelolaan pendapatan. Lemahnya daya saing petani menyebabkan rendahnya pendapatan, akhirnya tidak mendorong gairah petani untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraannya. Namun demikian, setidaknya ada dua alasan mengapa pangan dapat menjadi komoditas strategis dalam ekonomi Riau, *pertama*, masyarakat Riau banyak terlibat secara ekonomi dalam usaha perperangan baik dalam bidang produksi, pengolahan maupun distribusi dan *kedua*, pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga masih didominasi dari bahan pangan, misalnya sekitar 57 persen kalori bersumber dari beras.¹⁴

Kebijakan Pemerintah yang ditujukan untuk mendorong harga beras domestik yang tinggi menggunakan argumen di antaranya (1) banyak negara memberikan subsidi kepada para petaninya melalui subsidi domestik dan subsidi ekspor, (2) perdagangan pasar beras dunia sangat tipis dan menyebabkan harga beras tidak stabil, dan (3) harga beras tinggi membawa dampak positif bagi kegiatan perekonomian perdesaan melalui dampak pengganda (*multiplier effect*) yang dihasilkannya. Sementara itu bagi pendukung kebijakan harga beras rendah memberikan argumen bahwa (1) hanya sekitar 20-25 persen rumah tangga yang akan lebih sejahtera bila harga beras tinggi dan mereka bukanlah masyarakat

¹⁰ N. Majidi, "Anggaran Pembangunan dan Ketimpangan Ekonomi antar Daerah", *Prisma*, LP3S, 1997.

¹¹ Michael P. Todaro, *Economic Development*, (New York: New York University Press, Seventh Edition, 2000).

¹² S. Hadiwigno dan A. Pakpahan, "Identifikasi Wilayah Miskin di Indonesia", *Prisma*, LP3S, 1993, hal. 23-32.

¹³ John Di Jonathan, *The Resource Curse, Theory and Evidence*, (Spain: Elcano Royal Institute of International Studies dan Strategis Press, 2010).

¹⁴ Yasin, Rifai dan Maharani, "Agribisnis, Pangan dan Penanggulangan Kemiskinan di Riau", *Jurnal Perhepi*, 2010, hal. 2-24.

miskin sementara sebagian besar masyarakat justru akan sangat menderita akibat kebijakan harga beras tinggi, (2) berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, harga beras tinggi akan menghambat proses diversifikasi usaha tani yang seharusnya terjadi, (3) harga beras yang tinggi akan menyebabkan tenaga kerja akan menuntut upah yang lebih tinggi dan pada akhirnya akan menyebabkan turunnya investasi baik domestik maupun asing, dan (4) Pemerintah mempunyai kekhawatiran yang berlebihan bahwa kecenderungan kenaikan harga beras akan menjadi pemicu terjadinya inflasi karena komoditas beras memiliki bobot yang relatif besar dalam penghitungan indeks harga konsumen (IHK) dibandingkan komoditas lainnya.¹⁵

3. Swasembada Pangan dan Alih Fungsi Lahan

Tahun 2030 Indonesia setidaknya memerlukan sekitar 15 juta hektar lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan sekitar 280 juta penduduk demi terwujudnya swasembada pangan dan mencegah krisis pangan. Sementara itu, berdasarkan data Tim Koordinasi Pemantauan Luas Sawah tahun 2011, luas lahan sawah di Indonesia saat ini hanya 8,1 juta hektar.¹⁶ Solusi atas defisit pangan yang terjadi setiap tahun, dipenuhi dengan kebijakan impor beras yang terus meningkat, alih-alih membuka lahan pertanian baru, justru lahan-lahan pertanian pangan yang ada semakin menyusut akibat pengalihan fungsi menjadi perumahan dan industri.

Oleh karena itu, pembangunan sektor pertanian sebagai bagian integral dari pembangunan nasional menjadi semakin penting dan strategis mengingat selama ini pembangunan pertanian telah memberikan sumbangan besar dalam pembangunan nasional, baik sumbangan langsung dalam pembentukan PDB, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, menyediakan sumber pangan dan bahan baku industri, pemicu pertumbuhan ekonomi di perdesaan, perolehan devisa, maupun sumbangan tidak langsung melalui penciptaan kondisi kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lain.

Revitalisasi Pertanian dan Perdesaan, secara garis besar ditujukan untuk: (1) meningkatkan peran sektor pertanian dalam perekonomian nasional, (1) menciptakan lapangan kerja berkualitas di perdesaan, khususnya lapangan kerja non-pertanian, yang ditandai dengan berkurangnya angka pengangguran terbuka dan setengah terbuka, dan (3) meningkatkan

kesejahteraan petani, nelayan, dan masyarakat perdesaan, yang dicerminkan dari peningkatan pendapatan dan produktivitas pekerja di sektor pertanian.¹⁷

B. Tinjauan Empiris

Penelitian pernah dilakukan oleh Pantjar Simatupang dan Saktyanu K. Dermoredjo dengan menggunakan data deret waktu dalam kurun waktu tahun 1976-1999 dan diestimasi dengan metode kuadrat terkecil sederhana (OLS). Penelitian tersebut mengevaluasi hipotesis konsistensi menetes ke bawah, yang menunjukkan hubungan parabolik antara kemiskinan dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita, dengan data Indonesia. Selain PDB agregat, hipotesis juga diuji dengan menggunakan PDB dikelompokkan berdasarkan sektor dan menambahkan beberapa variabel harga alternatif. Studi menunjukkan bahwa agregat PDB per kapita tidak signifikan berhubungan dengan tingkat kemiskinan. Dampak dari PDB terpilah bervariasi menurut sektor dan wilayah. PDB Pertanian memiliki dampak terbesar pada tingkat kemiskinan di daerah perdesaan, sedangkan PDB industri menentukan tingkat kemiskinan di daerah perkotaan. Kemiskinan juga ditentukan oleh harga beras. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan pembangunan pertanian, subsektor tanaman pangan khususnya, adalah sebuah strategi yang tepat untuk mengurangi kemiskinan.¹⁸

Penelitian juga dilakukan oleh Santoso Basu dan Sushanta Mallick tahun 2007, yang menganalisis secara teoritis dan ekonometrik untuk mengetahui apakah *trickle down effect* terjadi di perdesaan India selama periode waktu yang lama. Penelitian tersebut menemukan bukti yang menunjukkan bahwa *trickle down effect* tidak terjadi sama sekali. Analisis menunjukkan bahwa peningkatan modal dan pengadaan tenaga kerja substitusi akan menghambat pertumbuhan ekonomi namun dapat mengurangi kemiskinan. Namun demikian penurunan kemiskinan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi yang terjadi selama akhir tahun 1970-an dan tahun 1980-an sebagian besar akibat program pemerintahan anti-kemiskinan dengan memberikan distribusi kredit yang lebih merata dan subsidi pertanian kepada petani kecil dan marjinal.¹⁹

¹⁵ Peter Timmer, "The Future of Food Policy in Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum di Universitas Indonesia tanggal 30 November 2006.

¹⁶ Laporan Utama, "Ironi Negeri Agraris Mengimpor Pangan", *Majalah GATRA* No. 27 Tahun XVIII, 10-16 Mei 2012.

¹⁷ Abdul Munif, "Strategi dan Pencapaian Swasembada Pangan di Indonesia", Makalah disampaikan dalam FGD Kementerian Keuangan tanggal 22 Februari 2009.

¹⁸ Pantjar Simatupang dan K. Saktyanu, "Produk Domestik Bruto, Harga dan Kemiskinan: Hipotesis "Trickle Down" Dikaji Ulang", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, 51(3), 2003, hal. 291-324.

¹⁹ Santoso dan Sushanta, "Poverty and Trickle Down: A Quantitative Analysis", *Cambridge Journal of Economics*, 32, 2007, hal. 461-477.

Penelitian mengenai kondisi perberasan dan kebijakan perdagangan beras di Indonesia dilakukan oleh Sulastrri Surono tahun 2006 yang menyebutkan bahwa upaya peningkatan produksi beras untuk mengurangi impor dapat dilakukan dengan menekan kehilangan produksi dari kegiatan pasca panen dari 18 persen menjadi 5 persen serta perlunya lembaga khusus yang bertanggung jawab mengeluarkan data yang berkaitan dengan produksi, konsumsi dan impor beras. Selain itu juga perlunya kebijakan pemerintah mengenai harga pangan untuk menjaga eksistensi petani pangan.²⁰

III. METODOLOGI

A. Lingkup Penelitian

Pengambilan data dan wawancara dengan instansi dilaksanakan di Provinsi Riau pada Juli tahun 2011.²¹ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 dengan *cross section* dan berjumlah 12 kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Riau. Pemilihan data disesuaikan dengan ketersediaan data di BPS Pusat, BPS provinsi, Dinas Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, dan Dinas Perdagangan Provinsi Riau. Secara rinci, data yang digunakan:

1. PDRB agregat dan kabupaten/kota di Provinsi Riau berdasarkan lapangan usaha tahun 2005 sampai dengan tahun 2009.
2. Jumlah penduduk miskin setiap kabupaten/kota Provinsi Riau tahun 2005 sampai dengan tahun 2009.
3. Harga beras kabupaten/kota Provinsi Riau tahun 2005 sampai dengan tahun 2009.

Metode estimasi yang digunakan untuk pengolahan data adalah regresi data panel. Data panel merupakan data gabungan antara *cross section* dengan *time series*. Regresi dengan menggunakan data panel memiliki kelebihan mampu menyediakan data lebih banyak dan dapat mengatasi masalah yang timbul ketika terjadi penghilangan variabel melalui penggabungan *cross section* dengan *time series*.²²

Selain itu penggunaan data panel memungkinkan untuk dapat mengangkat karakteristik antar individu dan antar waktu yang bisa saja berbeda-beda. Data panel adalah suatu set observasi yang terdiri dari beberapa individu pada periode tertentu. Observasi tersebut merupakan pasangan y_{it} dengan x_{it} di mana

i menunjukkan individu, t menunjukkan waktu dan j menunjukkan variabel bebas. Spesifikasi model regresi data panel adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = a_i + b_i X_{it} + c_{it}$$

$$t = 1, 2, \dots, T \quad i = 1, 2, \dots, N$$

$$\text{dan } j = 1, 2, \dots, K \dots \dots \dots (1)$$

Penulis membatasi pada penggunaan data panel yang bersifat *balance panels* yaitu data yang digunakan yang memiliki jumlah observasi yang sama untuk setiap individunya sehingga total observasi yang dimiliki adalah $n \times T$.

Dalam analisa model data panel dikenal tiga macam pendekatan yang terdiri dari pendekatan kuadrat terkecil (*pooled least square*), pendekatan efek tetap (*fixed effect*), dan pendekatan efek acak (*random effect*). Pendekatan kuadrat terkecil mengasumsikan bahwa intersep dan *slope* dianggap konstan baik antar daerah maupun antar waktu, dan hal ini mungkin kurang beralasan. Pendekatan *random effect*, variasi pada intersep dapat memecahkan komponen *error*. Untuk menentukan antara *pooled least square* dengan *fixed effect* digunakan uji F statistik sementara untuk *random effect* dengan *fixed effect* digunakan uji Hausman. Dengan alasan tersebut maka teknik regresi yang digunakan adalah regresi data panel dengan *fixed effect* yang menggunakan perangkat lunak *Eviews*.

B. Metode Analisis

Tingkat kesejahteraan ekonomi suatu daerah dapat diukur secara agregat melalui PDRB tiap kabupaten/kota. Sejalan dengan itu, penelitian tentang efektivitas pembangunan dalam penanggulangan kemiskinan umumnya dilakukan dengan mengkaji hubungan antara tingkat kemiskinan dan atau pemerataan pendapatan dengan tingkat pendapatan per kapita.²³

Menurut BPS pengertian PDRB atas dasar harga konstan yaitu jumlah nilai produksi atau pengeluaran atau pendapatan yang dihitung menurut harga tetap. Dengan cara menilai kembali atau mendefinisikan berdasarkan harga-harga pada tingkat dasar dengan menggunakan indeks harga konsumen. Dari perhitungan ini tercermin tingkat kegiatan ekonomi yang sebenarnya melalui PDRB riilnya.

Metode tersebut secara implisit mengasumsikan bahwa PDRB tidak terpengaruh terhadap kemiskinan dan distribusi pendapatan. Namun bukti empiris menunjukkan bahwa struktur PDRB menurut sektor berubah cepat dan memang berpengaruh terhadap kemiskinan dan distribusi pendapatan.²⁴

²⁰ Sulastrri Surono, "Kondisi Perberasan dan Kebijakan Perdagangan Beras di Indonesia", *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 2(2), 2006, hal. 183-202.

²¹ Asep Ahmad Saefuloh dkk, "Strategi dan Kebijakan Pengembangan Sektor Pertanian dan Perlindungan-Pemberdayaan Petani", (Jakarta: Penelitian kelompok Tim EKP Setjen DPR RI, 2011).

²² Agus Widarjono, *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*, (Jakarta: Penerbit Ekonisia, Edisi Ketiga, 2009).

²³ Dharma Naram, *Agricultural Change and Rural Poverty: Variation in a Theme*, (Baltimore USA: Johns Hopkins University Press, 1985), hal. 23.

²⁴ *Ibid.*

$$JPM = f (PDRB) \dots\dots\dots (2)$$

Di mana:

JPM = Jumlah Penduduk Miskin.

Jumlah penduduk miskin dan tingkat pemerataan tidak hanya ditentukan PDRB semata tetapi juga dipengaruhi oleh nilai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum yang didominasi oleh kebutuhan pangan. Oleh karena itu, tingkat harga khususnya harga pangan, sangat berpengaruh terhadap batas kemiskinan yang berarti juga terhadap jumlah penduduk miskin. Pada penelitian ini, harga pangan akan direpresentasikan dengan harga beras di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Riau dengan observasi dilakukan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009.

$$JPM = a_1 + a_2 PDRB + a_3 HB \dots\dots\dots (3)$$

Di mana:

HB = Harga Beras.

Selain dari itu, implikasi dari argumen sebelumnya maka determinan kemiskinan dan pemerataan bervariasi menurut daerah/wilayah. Determinan kemiskinan di satu daerah tentu berbeda dengan daerah lainnya, yang artinya dapat menghasilkan kesimpulan yang kurang *valid* sehingga akan berdampak pada pendekatan kebijakan yang dihasilkan menjadi tidak tepat.

Persamaan di atas disempurnakan dengan mendisagregasi PDRB menjadi kelompok besar berdasarkan PDRB sektor, yaitu (1) pertanian, peternakan, kehutanan, (2) pertambangan dan penggalian, (3) industri pengolahan, dan (4) jasa-jasa serta akan dilanjutkan dengan mendisagregasi berdasarkan PDRB sub sektor pertanian dan industri dan adakah hubungan atau pengaruh yang diberikan sektor pertambangan dan penggalian (sektor migas) kepada sektor-sektor lainnya juga akan menjadi topik pembahasan penelitian ini.

$$JPM_{kt} = a_1 + a_2 PDRBP_{kt} + a_3 PDRBI_{kt} + a_4 PDRBM_{kt} + a_5 PDRBJ_{kt} + a_6 HB_{kt} \dots\dots\dots (4)$$

$$JPM_{kt} = a_1 + a_2 MKN_{kt} + a_3 PKB_{kt} + a_4 PTR_{kt} + a_5 KHN_{kt} + a_6 PRN_{kt} + a_7 GDPM_{kt} + a_8 GDPJ_{kt} + a_9 HB_{kt} \dots\dots\dots (5)$$

Selain itu, penelitian ini juga ingin melihat hasil yang ditunjukkan terhadap masing-masing kabupaten/kota. Bagaimana hubungan dan pengaruh yang diberikan, dengan membandingkan tanda dan nilai konstanta yang dihasilkan. Dengan demikian, dapat diketahui sejauh mana kebijakan harga pangan yang dijalankan dapat secara efektif memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan petani miskin yang mayoritas berada di perdesaan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Provinsi Riau²⁵

Provinsi Riau terletak pada bagian tengah pulau Sumatera dengan ibu kota Pekanbaru. Provinsi ini termasuk salah satu provinsi terkaya di Indonesia dengan mengandalkan hasil dari minyak bumi dan gas. Luas wilayah Provinsi Riau adalah 87.023,66 km². Keberadaannya membentang dari lereng Bukit Barisan sampai Selat Malaka, dengan iklim tropis basah yang dipengaruhi oleh musim kemarau serta musim hujan. Rata-rata hujan per tahun sekitar 160 hari. Provinsi ini memiliki sumber daya alam, baik kekayaan yang terkandung di perut bumi, berupa minyak bumi dan gas, serta emas, maupun kekayaan hasil hutan dan perkebunannya, serta kekayaan sungai dan lautnya.

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 jumlah penduduk Provinsi Riau tercatat sebesar 5.543.031 jiwa di mana laki-laki sebanyak 2.854.989 jiwa dan perempuan sebanyak 2.688.042 jiwa. Kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Kota Pekanbaru dengan jumlah penduduk 903.902 jiwa, sedangkan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 176.371 jiwa.

Gambaran umum perekonomian Provinsi Riau memperlihatkan kecenderungan yang positif. Hal ini terlihat dari angka PDRB terjadi kenaikan dari Rp.276,4 triliun pada tahun 2008 menjadi Rp.319,5 triliun pada tahun 2009.

Tabel 1. Sumbangan Sektor Ekonomi terhadap PDRB Provinsi Riau

(dalam Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2008	2009
Pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan	53.137.563,80	60.667.094,67
Pertambangan dan penggalian	123.781.863,82	134.323.353,09
Industri pengolahan	50.179.230,71	61.774.097,69
Listrik, gas, dan air	461.086,39	524.534,45
Bangunan	11.308.251,44	14.728.573,82
Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel	19.317.092,67	24.828.976,77
Angkutan, pergudangan, dan komunikasi	4.867.262,36	5.750.516,88
Jasa kemasyarakatan	8.279.660,08	10.312.558,00
Total	276.400.129,95	319.510.784,41

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2010.

Sumbangan sektor ekonomi bagi PDRB Provinsi Riau diberikan oleh sektor pertambangan dan penggalian pada posisi pertama, dilanjutkan dengan sektor pertanian, kehutanan, perikanan, serta industri pengolahan pada posisi kedua dan ketiga. Terdapat pergeseran di mana tahun 2008 sektor

²⁵ Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, *Riau Dalam Angka Tahun 2010*, (Riau: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2010).

pertanian berada pada posisi kedua melebihi sektor industri pengolahan namun pada tahun 2009 sektor industri pengolahan berada pada posisi kedua dalam memberikan sumbangan PDRB bagi Provinsi Riau (Tabel 1). Sementara itu, total angkatan kerja yang bekerja, ternyata sebagian besarnya terserap di sektor pertanian (43,9 persen) dan disusul oleh sektor perdagangan dan jasa sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Presentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha

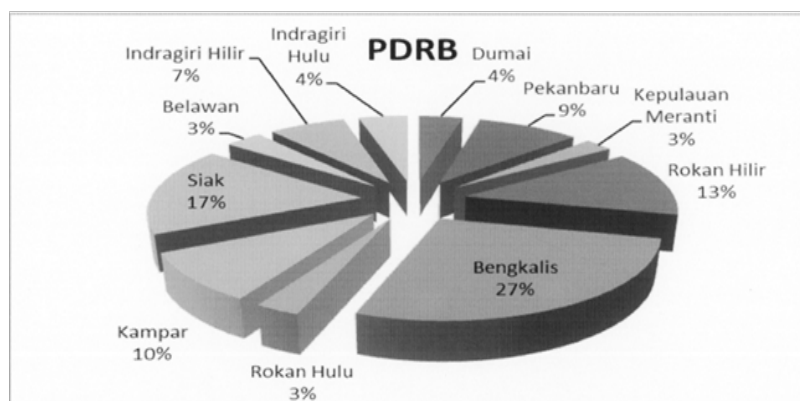
Lapangan Usaha	Tahun 2008	Tahun 2010
Pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan	48,4	43,9
Pertambangan dan penggalian	2,1	2,6
Industri pengolahan	5,8	5,4
Listrik, gas, dan air	0,5	0,2
Bangunan	4,8	5,5
Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel	18,2	19,3
Angkutan, pergudangan, dan komunikasi	4,8	4,3
Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan	1,5	1,7
Jasa kemasyarakatan	13,9	17,1

Sumber: BPS, 2009 dan Depnakertrans, 2011.

Provinsi Riau terbagi menjadi 10 kabupaten, yaitu Kuantan Singgigi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti, serta 2 kota yaitu Pekanbaru dan Dumai. Perolehan PDRB berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Riau, terbesar disumbang oleh Kabupaten Bengkalis, kemudian disusul Siak dan Rokan Hilir. Ketiga kabupaten dengan PDRB terbesar tersebut secara bersamaan menitikberatkan struktur perekonomian pada pertambangan dan penggalian (Gambar 1).

berjumlah 482.050 jiwa (8,47 persen), mengalami penurunan sebesar 18.210 jiwa jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret tahun 2010 yang berjumlah 500.260 jiwa (8,65 persen). Secara keseluruhan tampak mengalami penurunan jumlah penduduk miskin, namun ternyata mengalami kenaikan untuk penduduk miskin yang berada di perdesaan yaitu dari 291,34 pada Maret tahun 2010 menjadi 340,13 pada Maret tahun 2011 (kenaikan 48.8 persen).

Penduduk miskin yang berada di perdesaan pada umumnya bergerak di sektor pertanian, di mana sektor pertanian banyak menyerap tenaga kerja di Provinsi Riau. Kondisi tersebut menuntut perhatian Pemerintah Provinsi agar melahirkan kebijakan ekonomi kerakyatan yang mampu mengangkat keterpurukan sosial ekonomi penduduk Riau umumnya dan khususnya mereka yang bekerja di sektor pertanian. Strategi pembangunan ekonomi yang dilandaskan pada prioritas pertanian dan ketenagakerjaan paling tidak memerlukan tiga unsur pelengkap dasar, yaitu: (1) percepatan pertumbuhan output melalui serangkaian penyesuaian teknologi, institusional, dan insentif harga yang khusus dirancang untuk meningkatkan produktivitas para petani kecil, (2) peningkatan permintaan domestik terhadap output pertanian yang dihasilkan dari strategi pembangunan perkotaan yang berorientasikan pada upaya pembinaan ketenagakerjaan, serta (3) diversifikasi kegiatan pembangunan daerah perdesaan yang bersifat padat karya, yaitu non pertanian, yang secara langsung dan tidak langsung akan ditunjang dan menunjang masyarakat pertanian.²⁶ Dalam skala yang lebih luas, pembangunan sektor pertanian dan daerah perdesaan diyakini sebagai intisari pembangunan dikarenakan tanpa adanya pembangunan perdesaan



Sumber: BPS Provinsi Riau, 2010.

Gambar 1. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau berdasarkan Kabupaten/Kota

Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) pada Maret tahun 2011

²⁶ Chenery B. Hollis dan Srinivasan T. N., *Handbook of Development Economics*, (Amsterdam: Elsevier-North Holland Press, Edisi I, 1988), hal. 276-331.

Tabel 3. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Riau

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
2011	141,92	340,13	482,05	6,37	9,83	8,47
2010	208,92	291,34	500,26	7,16	10,15	8,65
2009	225,60	301,89	527,49	8,04	10,93	9,48

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2011.

yang terintegrasi akan menghambat pembangunan sektor industri, menciptakan ketimpangan dan memperparah kemiskinan dan pengangguran.

Pertumbuhan penduduk di daerah perdesaan yang cepat menimbulkan berbagai tekanan berat dalam penggunaan lahan. Semakin lama semakin banyak orang yang menggarap sebidang lahan yang sama sehingga tingkat kesuburannya mengikis dengan cepat. Sementara metode dan teknologi produksinya tidak mengalami perkembangan yang berarti. Sesuai dengan prinsip perolehan hasil yang semakin berkurang (*diminishing returns*) bahwa jika semakin banyak orang yang mengerjakan sebidang lahan, maka tingkat produktivitas marjinal akan semakin menurun dan akhirnya standar hidup petani perdesaan akan semakin terpuruk. Dengan demikian dapat dipahami manakala PDRB Provinsi Riau sektor pertanian semakin jauh tertinggal dibandingkan dengan PDRB migas dan industri sementara jumlah tenaga kerja yang bergerak di sektor pertanian jauh lebih banyak dibandingkan dengan sektor lainnya. Hasil akhirnya dapat diketahui, jumlah masyarakat petani miskin perdesaan akan bertambah banyak.

Beberapa pemerintah, baik di negara industri maupun negara berkembang, tidak membiarkan kekuatan pasarebagai satu-satunya yang menentukan harga pertanian pangan. Kebijakan Pemerintah mempertahankan harga pangan yang tinggi baik untuk meningkatkan produksi pertanian maupun untuk mempertahankan pendapatan pertanian. Akan tetapi, banyak pemerintah negara berkembang yang menawarkan harga yang rendah atas hasil panen petani dengan harapan dapat mengontrol dan menjual harga pangan yang rendah kepada masyarakat perkotaan dengan alasan pengaruh politik. Dengan menetapkan harga yang dibayar kepada petani pada tingkat rendah, Pemerintah mampu menjual pangan kepada masyarakat kota dengan harga yang rendah meskipun jumlah masyarakat kota jauh lebih sedikit dibandingkan dengan masyarakat perdesaan untuk menghindari kerusuhan pangan yang mungkin terjadi di perkotaan. Akhirnya masyarakat petani di perdesaan akan bereaksi terhadap kebijakan harga rendah dengan mengurangi jumlah keluaran yang diproduksi. Masyarakat petani akan beralih ke komoditas yang tidak dikontrol pemerintah. Dengan

begitu kekurangan produksi pangan di dalam negeri menjadi tersebar luas dan akhirnya Pemerintah akan mengambil kebijakan impor pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terutama di perkotaan.²⁷

Maka tidak mengherankan jika penduduk yang bekerja pada sektor pertanian di perdesaan menjadi miskin dan bertambah miskin mengingat: (1) sumber daya alam, lahan kurang subur, pendayagunaan lahan kurang produktif, degradasi lahan, kepemilikan lahan pertanian, pengalihan lahan, (2) keterbatasan penguasaan dan penerapan teknologi dan unsur pendukungnya, (3) sumber daya manusia yang berkaitan dengan rendahnya pendidikan dan produktivitas kerja, dan (4) prasarana dan permodalan termasuk kelembagaan akan semakin menghambat kinerja pertanian pangan.

Daya saing pertanian pangan lebih rendah dibandingkan pertanian non pangan karena (1) pertanian pangan merupakan pertanian padat karya, (2) sangat bergantung pada kondisi iklim dan cuaca, (3) membutuhkan irigasi dan prasarana pertanian, (4) seringkali terganggu oleh hama dan penyakit tanaman lainnya, (5) membutuhkan SDM yang berkualitas, dan (6) harga jual pangan lebih rendah dibanding komoditas non pertanian lainnya seperti kelapa sawit, yang membuat petani pangan beralih ke komoditas lain.

Dengan demikian Provinsi Riau akan semakin sulit meningkatkan produksi pertanian untuk mengurangi defisit pangan secara bertahap (Tabel 4.) Sementara itu alih fungsi lahan pun menjadi tak terhindari sehingga akan menghambat terwujudnya swasembada pangan. Untuk memperlambat alih fungsi lahan persawahan dan dalam rangka mengatasi kekurangan beras maka pemerintah mencanangkan Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM) sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Program yang terdapat dalam OPRM yang meliputi: (1) melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap para petani, (2) memberikan kompensasi atas pernyataan untuk tidak melakukan alih fungsi lahan, (3) memberikan bantuan bibit padi kepada para petani selama 2

²⁷ Case E. Karl dan Fair C. Ray, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Makro*, (Jakarta: Penerbit PT. Indeks Kelompok Gramedia, Edisi Kelima, 2004), hal. 423-425.

tahun, dan (4) membuat cetak sawah baru secara gratis.²⁸

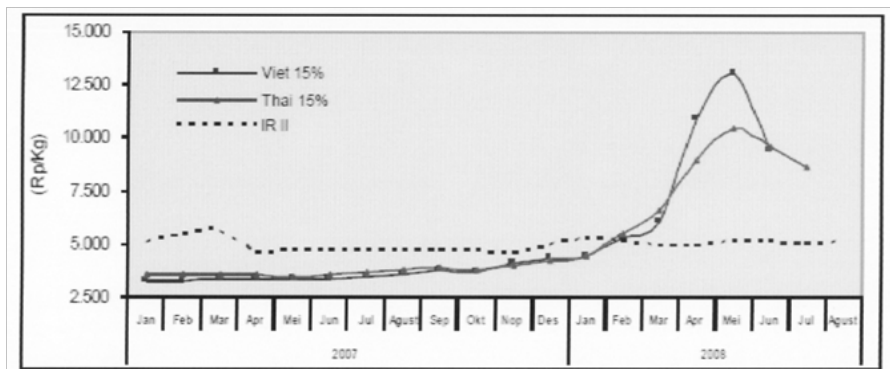
Tabel 4. Kekurangan Pasokan Beras di Provinsi Riau Tahun 2005-2009

(dalam ton)

Tahun	Kebutuhan Beras/Tahun	Produksi Beras	Kekurangan Beras/Tahun	
2005	546.744	245.535	-301.209	-55,09 persen
2006	546.419	248.356	-298.063	-54,55 persen
2007	552.275	283.79	-268.485	-48,61 persen
2008	577.029	311.384	-265.645	-46,04 persen
2009	577.359	335.863	-241.496	-41,83 persen

Sumber: Dinas Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, 2010.

Pembangunan sektor pertanian harus ditunjang dan didukung oleh petani yang tangguh. Karena sesungguhnya petani sebagai pemilik lahan, pemilik modal, pemilik tenaga dan pemilik usaha. Sementara peranan pemerintah di antaranya memberikan bimbingan, memfasilitasi kebutuhan petani serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan usaha pertanian menuju swasembada pangan serta bagaimana pemerintah berupaya menghasilkan kebijakan harga beras yang pro pada petani dan kebijakannya terhadap impor beras ditengah fluktuasi harga beras nasional dan internasional sehingga tidak merugikan petani pangan (Gambar 2).



Sumber: RPJMN 2009-2014.

Gambar 2. Perkembangan Harga Beras Dalam Negeri dan Internasional

B. Olah Data dan Analisa

1. Dugaan Regresi PDRB terhadap Prevalensi Kemiskinan

Model regresi data panel *fixed effect* digunakan untuk menguji hipotesis bahwa peningkatan PDRB seharusnya berpengaruh nyata negatif terhadap prevalensi kemiskinan. Secara sederhana, peningkatan PDRB dapat dianggap sebagai kemajuan suatu daerah maka akan berdampak pada pengurangan jumlah penduduk miskin.

Dari dugaan regresi PDRB terhadap kemiskinan diperoleh hasil sesuai persamaan di bawah ini bahwa PDRB tidak berpengaruh nyata terhadap pengurangan

jumlah penduduk miskin menurut:

$$JPM = 43.178,21 + 0,000619 \text{ PDRB} \dots \dots \dots (6)$$

$$(0,0058) \quad (0,7676)$$

Dengan R² sebesar 0,918943 dan *Adjusted R*² = 0,898247.

Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan peningkatan PDRB belum memberikan dampak nyata pada pengurangan jumlah penduduk miskin baik di perkotaan maupun di perdesaan. Banyak alasan yang dapat menyebabkan hal ini bisa terjadi. Bisa jadi kekayaan alam yang berlimpah di suatu daerah, baru terbatas memberikan imbas bagi kenaikan harga kebutuhan pada daerah lainnya namun belum mampu meningkatkan kemampuan daya beli bagi masyarakat secara keseluruhan. Atau kebijakan belanja pembangunan daerah belum sepenuhnya diarahkan pada penguatan ekonomi masyarakat miskin terutama yang berada di perdesaan.

Sementara itu, pengaruh PDRB per sektor/ lapangan usaha terhadap prevalensi kemiskinan ditentukan dengan disagregasi PDRB. Namun pembahasan dibatasi hanya untuk sektor pertanian, industri pengolahan, pertambangan (migas), dan jasa yang dianggap sebagai sektor yang memberikan sumbangan ekonomi terbesar pada PDRB Provinsi Riau.

Tabel 5 memperlihatkan hasil dugaan regresi untuk PDRB sektor pertanian (model 2 dan 3) di mana arah menunjukkan tanda negatif dan secara nyata (taraf nyata 0,01) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian adalah sektor yang perlu diprioritaskan karena secara nyata dan langsung dapat mengurangi jumlah penduduk miskin untuk setiap kenaikan PDRB sektor pertanian sebesar Rp.1 miliar akan berkurang 30 orang penduduk miskin sesuai persamaan hasil di bawah ini:

$$JPM = 20.806 - 0,03 \text{ PDRB Pertanian} + 0,01022$$

$$\text{PDRB Migas} + 0,004218 \text{ PDRB No} \dots \dots (7)$$

$$(0,3243) \quad (0,0043) \quad (0,1777)$$

$$(0,2296)$$

²⁸ *Op. Cit.*, Sulastri Surono, hal. 6.

Dengan R^2 sebesar 0,935159 dan *Adjusted R*² = 0,914986.

Tabel 5. Dugaan Regresi PDRB Sektor terhadap Kemiskinan

Peubah	Model-1	Model-2	Model-3
Konstanta	18.616,38	20.806,1	21.755,27
	0,3777	0,3243	0,305
PDRB Pertanian	-0,019464	-0,030354	-0,034969
	0,1153	0,0043	0,0071
PDRB Non Pertanian	-	0,004218	-
	-	0,2296	-
PDRB Migas	0,016519	0,01022	0,014485
	0,0112	0,1777	0,0226
PDRB Non Migas	-	-	0,004207
	-	-	0,2374
PDRB Industri	-0,027472	-	-
	0,1662	-	-
PDRB Jasa	0,03283	-	-
	0,1544	-	-
R^2	0,937128	0,935159	0,93509
Adj. R^2	0,915695	0,914986	0,914896
Fixed Effects Cross			
Kuantan Singgigi	52.257,93	64.187,17	62.707,01
Indragiri Hulu	63.232,08	60.358,73	59.853,04
Indragiri Hilir	-133.533	-140,050	-140.041,9
Pelalawan	-75.485,37	-67.290,15	-66.905,6
Siak	-133.565,2	-148.922,2	-150.063,6
Kampar	20.695,24	47.196,25	46.234,53
Rokan Hulu	87.573,31	89.969,94	89.447,66
Bengkalis	-267.976,7	-248.509,9	-247.250,2
Rokan Hilir	-56.907,95	-31.870,13	-32.477,09
Kepulauan Meranti	1.510,987	3.188,934	4.002,808
Pekanbaru	-12.371,17	23.52,87	24.364,64
Dumai	39.555,07	-13.033,3	-7.031,425

Sumber: hasil olah data menggunakan *Views*.

Sementara itu, kenaikan PDRB Migas dan PDRB Non (Pertanian+Migas) secara bersamaan memberikan pengaruh positif pada kenaikan jumlah penduduk miskin dengan taraf nyata 0,5. Pengaruh positif ini dapat disebabkan karena kenaikan PDRB Migas dan Non (Pertanian+Migas) belum dirasakan manfaatnya bagi masyarakat keseluruhan, hanya kelompok tertentu saja. Terlebih lagi jika perusahaan yang bergerak di bidang migas dan non pertanian berasal dari luar maka akan sangat sedikit dampak positif yang diterima masyarakat petani miskin di perdesaan.

Oleh karena itu pemerintah perlu membuat langkah-langkah strategis untuk meningkatkan PDRB sektor pertanian melalui pembangunan ekonomi yang diarahkan pada pemberdayaan masyarakat petani miskin perdesaan. Selain itu juga pemerintah perlu

berupaya untuk membuat kenaikan PDRB migas dan non pertanian, dapat memenuhi prinsip *trickle down effect*. Sayangnya sampai saat ini, perkembangan produksi petani pangan di Provinsi Riau berjalan lambat, karena banyaknya kendala dan tantangan yang dihadapi petani pangan baik dalam proses produksi, pengolahan, pendistribusian maupun tantangan lain seperti perubahan iklim, serangan hama, kualitas benih, pengolahan gabah kering, termasuk daya dukung irigasi dan transportasi dalam pemasarannya. Belum lagi ketiadaan pengetahuan dan teknologi yang dimiliki petani membuat masih banyak petani yang masih menerapkan IP100, padahal sudah seharusnya mencapai IP200 atau IP300 untuk meningkatkan jumlah produksi dalam satu tahun dengan menambah jumlah masa panen. Selain itu juga munculnya degradasi lahan yang menyebabkan produktivitas cenderung menurun. Akhirnya alih fungsi lahan pun terjadi. Besarnya tantangan dan kurangnya daya dukung membuat petani pangan beralih ke sektor atau komoditas lain melalui pengalihan fungsi lahan.

Jika dilihat dari besaran *fixed effect cross* untuk masing-masing kabupaten/kota pada Tabel 5 terlihat bahwa yang memperoleh tanda positif pada keseluruhan model adalah Kabupaten Kuantan Singgigi, Indragiri Hulu, Kampar, dan Rokan Hulu. Sementara yang memperoleh *Fixed Effect Cross* bertanda negatif pada keseluruhan model adalah Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak dan Bengkalis. Hal ini dapat diartikan bahwa kabupaten yang pengurangan penduduk miskinnya melalui peningkatan sektor pertanian adalah yang memiliki tanda positif pada *Fixed Effect Cross* dan tanda negatif pada PDRB pertanian. Sedangkan daerah yang pengurangan penduduk miskinnya melalui penguatan sektor migas dan non pertanian dan migas adalah Bengkalis, Siak, Pelalawan, Indragiri Hilir, dan Rokan Hilir. Sementara itu dapat dilihat bahwa tingginya PDRB sektor migas, tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan terhadap jumlah masyarakat miskin. Daerah yang paling banyak penduduk miskinnya secara berurutan adalah Indragiri Hilir, Kampar, Rokan Hilir, dan Pelalawan (Gambar 3).

Kuantan Singgigi adalah kabupaten yang baru terbentuk pada tahun 1999, dengan luas 7.656,03 km² dan jumlah penduduk 320.314 orang. Tanaman perkebunan yang merupakan tanaman perdagangan yang cukup potensial di daerah ini adalah kelapa sawit (59.270,40 hektar) dan karet (3.000 hektar). PDRB sektor pertanian memberikan sumbangsih yang terbesar (60,0 persen), dilanjutkan industri (12,5 persen), dan pertambangan (9,3 persen).²⁹

²⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singgigi, *Kuantan Singgigi Dalam Angka 2010*, (Kuantan Singgigi: BPS Kabupaten Kuantan Singgigi, 2010).

Indragiri Hulu adalah kabupaten dengan sumbangan PDRB terbesar berasal dari sektor pertanian, kemudian industri pengolahan, dan perdagangan. Jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hulu adalah 353.597 jiwa. Sektor yang menyerap tenaga kerja terbanyak adalah sektor pertanian (10.058 pekerja) dan industri pengolahan (1.805 pekerja). Meskipun sektor pertanian adalah sektor yang menyerap tenaga kerja terbanyak, namun defisit beras mencapai 44,30 persen karena produksi tanaman pangan terbesar buah-buahan. Potensi minyak bumi mencakup luas area 12.866 km².³⁰

Rokan Hulu adalah kabupaten dengan luas 760.695 hektar yang terdiri dari lahan persawahan (0,5 persen) dan lahan kering (99,5 persen) dengan jumlah penduduk sebanyak 449.454 jiwa. Oleh karena itu primadona komoditas perdagangan di kabupaten ini adalah kelapa sawit, karet, kopi, dan kelapa. Sumbangan PDRB terbesar diberikan oleh sektor pertanian (52,29 persen), dilanjutkan industri (18,28 persen), dan pertambangan (7,34 persen). Dalam kurun waktu tahun 2007-2009, PDRB pertanian mengalami penurunan sebesar 14,60 persen sementara pertambangan mengalami kenaikan sementara industri turun naik.³¹

Kampar adalah kabupaten dengan luas 1.128.928 hektar dan jumlah penduduk 679,285 orang, di mana dari keseluruhan desa sebanyak 30 persen adalah desa tertinggal dan sangat tertinggal. Perusahaan industri yang terdapat di Kampar ada 1.024, dengan daya serap tenaga kerja secara berurutan industri hasil pertanian dan kehutanan (87,87 persen), industri logam, mesin dan kimia (7,7 persen) dan industri aneka (4,36 persen). Penggunaan tanah terbesar digunakan untuk perkebunan (353.505 hektar). Masih terdapat tanah tidur (43.634 hektar), rawa tidak ditanami (25.684 hektar), dan lain-lain (228.271 hektar).³²

Tabel 6. Peningkatan IP100-IP200, Cetak Sawah Baru dan Rehabilitasi Sawah Terlantar per Kabupaten Tahun 2009-2013

Kabupaten/Kota	Peningkatan IP100 - IP200	Cetak Sawah Baru	Rehabilitasi Sawah Terlantar
Kuantan Singgigi	2.733,70	1.718,05	570,00
Indragiri Hulu	1.159,70	2.111,50	951,60
Indragiri Hilir	22.472,50	3.449,60	3.625,00
Pelalawan	9.050,00	5.349,20	5.067,00
Siak	2.419,00	623,05	304,75

(dalam hektar)

³⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu, *Indragiri Hulu Dalam Angka 2009/2010*, (Indragiri: BPS Kabupaten Indragiri, 2010).

³¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu, *Rokan Hulu Dalam Angka 2009*, (Rokan Hulu: BPS Rokan Hulu, 2010).

³² Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar, *Kampar Dalam Angka 2010*, (Kampar: BPS Kampar, 2010).

Kampar	1.127,20	686,80	1.425,50
Rokan Hulu	786,00	2.050,00	291,00
Bengkalis	3.798,00	981,25	180,00
Rokan Hilir	24.562,00	1.795,60	685,00

Sumber: Dinas Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, 2010.

Dengan demikian, Provinsi Riau diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif andalan produksi padi. Hal ini disebabkan masih banyak potensi lahan sawah yang belum dimanfaatkan secara optimal seluas 228.127 hektar, termasuk lahan tidur seluas 54.377 hektar untuk menambah luas areal tanam.³³

Pemerintah menyusun kebijakan OPRM yang bekerja sama dengan 9 kabupaten/kota dan Pemerintah Pusat. Memerlukan waktu 5 tahun untuk areal seluas 100.000 hektar dan diperkirakan membutuhkan biaya Rp.1,2 triliun dengan konsep *budget sharing* (Tabel 6.) Program OPRM mengarah pada petani marginal atau miskin yang selama ini sangat kesulitan menggarap lahan akibat ketidaktersediaan lahan yang akan digarap. Dengan konsep OPRM melalui Pemerintah Kabupaten setempat, setiap petani akan memperoleh antara 1-1,5 hektar lahan yang akan mereka garap yang pada periode berikutnya lahan tersebut akan dapat dimiliki tergantung pada kebijakan Pemerintah Kabupaten. Pemerintah Pusat akan memfasilitasi dan mendukung kegiatan yang sedang akan dilakukan, termasuk di dalamnya memberikan bimbingan teknis dan penyediaan penyuluh kepada petani setempat.³⁴

Sementara untuk PDRB sektor migas secara agregat menunjukkan tanda positif dan secara nyata (taraf nyata 0,05) berpengaruh positif terhadap penambahan jumlah penduduk miskin. Ironis mungkin hasilnya, ketika peningkatan PDRB ternyata baru sampai pada tahap menambah jumlah penduduk miskin. Meskipun Provinsi Riau menghasilkan sekitar 40 persen dari volume *lifting* minyak nasional, namun yang dikembalikan ke daerah Riau hanya sekitar 9 persen karena dana bagi hasil migas sebesar 15,5 persen untuk minyak bumi dan 30,6 persen untuk gas bumi dibuat sebagai salah satu faktor untuk mengurangi dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Apakah kemudian dana tersebut diprioritaskan bagi upaya mengurangi jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota wilayahnya atau kabupaten kota lainnya. Ataukah mungkin semua masih dalam tataran teori sementara kenyataan sebagai daerah penghasil migas telah berdampak pada peningkatan kebutuhan hidup pada sebagian orang yang membuat harga-harga kebutuhan meningkat

³³ Pemerintah Daerah Provinsi Riau, Lembaran Resmi Dinas Pangan dan Hortikultura, (Riau: Pemda Provinsi Riau, 2010).

³⁴ "Operasi Pangan Riau Makmur menuju Swasembada Pangan", (<http://proriau.com/tokoh.php?act=full&id=4>, diakses 3 Juni 2012).

sementara daya beli masyarakat keseluruhan belum merata. Pemerintah perlu fokus pada upaya mengurangi jumlah penduduk miskin di daerahnya yang sebagian besar berada di perdesaan dan bekerja sebagai petani dengan menyusun program-program pemberdayaan ekonomi dan penguatan infrastruktur pertanian di daerahnya, melalui berbagai kegiatan pendampingan.

Investasi swasta yang relatif besar di provinsi ini dimungkinkan mengingat Provinsi Riau sebagai penghasil utama minyak bumi Indonesia yang ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah proyek baru penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) yang disetujui pemerintah.³⁵ Namun demikian, tingginya investasi tersebut belum memberikan nilai positif bagi penanggulangan kemiskinan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian Pemerintah perlu mengkaji ulang kesepakatan dengan perusahaan internasional atau nasional yang bergerak di sektor migas, kebijakan yang harus diambil sebagai implikasi pengambilan kekayaan alam pada daerah tersebut yang seharusnya mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar melalui salah satunya kebijakan penyediaan infrastruktur dasar daerah yang dapat memiliki efek pengganda bagi peningkatan perekonomian daerah.³⁶

Pemerintah harus bersikap proaktif dalam menyusun kebijakan dan *platform* perekonomian yang tepat bagi Provinsi Riau, yaitu mengedepankan kesesuaian potensi dan kondisi sosial budaya masyarakatnya.³⁷ Daerah dengan PDRB sektor pertanian yang besar belum tentu secara langsung mengurangi jumlah penduduk miskin di perdesaan apabila didominasi oleh perkebunan kelapa sawit dan karet yang banyak dikuasai oleh perusahaan besar dan asing, karena masyarakat tetap menjadi buruh kecil. Banyak petani pangan Riau yang mulai mengalihkan lahannya menjadi perkebunan kelapa sawit, karena bernilai jual tinggi dan tidak sulit dalam pengolahannya. Lahan pertanian yang semakin sempit karena beralih ke kelapa sawit, industri, maupun perumahan secara tidak langsung mengurangi lapangan kerja pertanian pangan dan menjadi tantangan besar bagi ketahanan pangan. Dengan demikian tidak mengherankan jika

kemiskinan justru terjadi di daerah-daerah yang sumbangan ekonomi terbesarnya berada pada sektor pertanian. Pemerintah perlu meningkatkan nilai jual petani pangan dengan memberikan kemudahan akses terhadap prasarana pertanian, baik kepemilikan tanah pertanian, fasilitas irigasi, bibit unggul, dan memberikan insentif bagi petani yang komitmen mengembangkan pertaniannya sehingga dapat meningkatkan jumlah produksinya dan memenuhi kebutuhan beras setiap tahun baik di daerahnya sendiri maupun secara nasional secara keseluruhan.³⁸

2. Dugaan Regresi Harga Beras terhadap Kemiskinan

Dugaan regresi harga beras terhadap kemiskinan yang ditunjukkan dalam Tabel 7 memperlihatkan bahwa harga beras secara nyata berpengaruh negatif terhadap prevalensi kemiskinan dengan taraf nyata yang berbeda-beda di setiap model.

Dengan membandingkan hasilnya, model 2 dianggap paling sesuai dengan persamaan hasil:

$$\begin{aligned} \text{JPM} = & 12475 - 3,78(\text{Harga}) - 0,0067(\text{PDRB Pertanian}) \\ & + 0,011(\text{PDRB Non Pertanian}) \dots \dots \dots (8) \\ & (0,5057) (0,0269) (0,6307) \\ & (0,0014) \end{aligned}$$

Dengan R^2 sebesar 0,939493 dan *Adjusted R*² = 0,920669.

Dari persamaan di atas bahwa harga beras berpengaruh negatif secara nyata (taraf nyata 0,05) begitupun dengan PDRB Pertanian namun tidak nyata, sedangkan PDRB Non Pertanian secara nyata (taraf nyata 0,001) berpengaruh positif terhadap prevalensi kemiskinan. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan kebijakan stabilisasi harga beras pada daerah yang mayoritas penduduknya adalah masyarakat petani karena harga beras tinggi membawa dampak positif bagi kegiatan perekonomian perdesaan melalui dampak pengganda yang dihasilkannya.

Kemiskinan di Provinsi Riau yang didominasi oleh masyarakat petani pangan di perdesaan yang perkembangannya sangat dipegaruhi oleh harga beras di pasar domestik yang bersifat fluktuatif. Fluktuasi harga beras disebabkan oleh tiga hal yaitu (1) ketidakstabilan harga beras antar musim (musim panen dan musim paceklik), (2) ketidakstabilan antar tahun karena pengaruh iklim misalnya kekeringan dan banjir, dan (3) fluktuasi harga beras di pasar internasional.³⁹

Ketidakstabilan harga antar musim terkait dengan panen raya yang berlangsung pada bulan Februari sampai Mei, di mana jumlah produksi beras saat itu

³⁵ W. Nicholson dan C. Snyder C, *Microeconomic Theory; Basic Principles and Extensions*, (United Kingdom: Thompson Learning Academic Resource Center Press, Tenth Edition, 2008).

³⁶ Komara, Asmara Hendra, "Strategi Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan di Provinsi Riau", *Jurnal Teroka*, 10(2), Agustus 2010, p. 85-97.

³⁷ Yunastiti Purwaningsih, "Ketahanan Pangan: Situasi, Permasalahan, Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 9(1), Juni 2008, hal. 29.

³⁸ A. W. Sachiho, *Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Propinsi Riau: Sebuah Tafsiran Seputar Pemberdayaan Petani Kebun*, (Tokyo: Komaba Studies in Human Geography Press, 2008), p. 7.

³⁹ *Op. Cit.*, Sulastri Surono, hal.6.

Tabel 7. Dugaan Regresi Harga Beras terhadap Kemiskinan

Peubah	Model-1	Model-2	Model-3	Model-4	Model-5
Konstanta	-7.170,819	12.474,92	43.597,52	56.122,3	5.821,517
	0,7404	0,5057	0	0	0,8031
Harga Beras	-4,561212	-3,786938	-3,741564	-1,419455	-2,30742
	0,0024	0,0269	0,0136	0,1015	0,2229
PDRB Pertanian		-0,006771			-0,009009
		0,6307			0,5436
PDRB Industri					-0,016131
					0,4562
PDRB Migas	0,015231				0,016906
	0,015				0,0093
PDRB Jasa					0,044461
					0,0755
PDRB Non Pertanian		0,011125			
		0,0014			
PDRB Non Migas	0,00755		0,008204		
	0,0669		0,0592		
R ²	0,937939	0,939493	0,929107	0,92334	1,0000
Adj. R ²	0,918631	0,920669	0,909072	0,903767	1,0000
Fixed Effects Cross					
Kuantan Singgigi	63.725,73	58.749,84	10.094,88	3.555,998	35.509,6
Indragiri Hulu	48.539,31	42.197,65	-5.202,713	-3.637,225	-12.003,86
Indragiri Hilir	83.138,8	87.048,95	25.201,47	45.583,95	61.113,54
Pelalawan	66.141,71	58.446,86	10.773,54	4.767,07	-11.599,03
Siak	-146.474,7	-115.447,8	-24.683,49	-26.574,95	-25.479,41
Kampar	8.781,683	30.506,26	15.759,07	20.146,38	66.667,75
Roka Hulu	94.189,21	85.280,23	40.236,05	32.138,07	60.008,78
Bengkalis	-238.753,5	-185.226,4	8.152,582	3.111,522	-19.210,24
Roka Hilir	-56.046,34	-28.274,82	1.622,949	1.975,935	-50.719,63
Kepulauan Meranti	30.749,73	14.353,31	-10.706,4	-26.761,72	-33.638,41
Pekanbaru	6.253,824	-41.374,74	-54.289,32	-24.049,79	-32.924,77
Dumai	39.754,47	-6.259,277	-16.958,62	-30.255,23	-37.724,33

Sumber: hasil olah data menggunakan Eviews.

mencapai 60-65 persen dari total produksi. Produksi beras pada musim kemarau yang berlangsung antara bulan Juni hingga September mencapai 23-30 persen dan sisanya dihasilkan pada bulan Oktober sampai Januari. Jika harga beras diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar, harga beras akan jatuh pada musim panen raya dan meningkat pesat pada musim paceklik. Ketidakstabilan harga tersebut akan merugikan produsen pada musim panen dan merugikan konsumen pada musim paceklik.

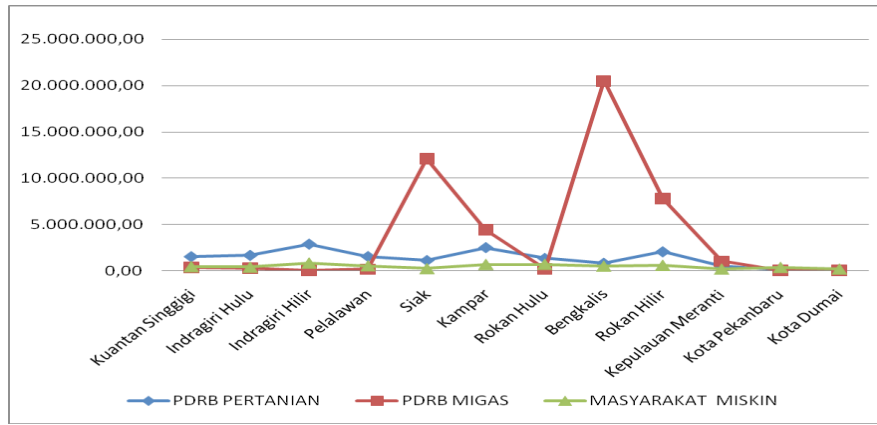
3. Dugaan Regresi PDRB Sub Sektoral Pertanian terhadap Kemiskinan

Untuk melihat sub sektor pertanian manakah yang memiliki pengaruh nyata bagi pengurangan jumlah penduduk miskin secara langsung perlu dilakukan disagregasi PDRB sektor pertanian terhadap

sub sektor pertanian yaitu tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan.

Tabel 8 memperlihatkan dengan derajat determinasi (R^2) yang memenuhi, diperoleh hasil bahwa masing-masing variabel yang menunjukkan signifikan pada taraf tertentu. PDRB sub sektor pertanian yang menunjukkan pengaruh secara negatif terhadap prevalensi kemiskinan adalah tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan, sementara yang menunjukkan pengaruh secara positif adalah kehutanan dan perikanan.

Hal ini bisa diduga ada hubungan antara variabel PDRB per sektor maupun sub sektor yang membuat hasil pengolahan data terpengaruh seperti ditunjukkan dalam Tabel 8. Selain itu juga adanya hubungan antar sub sektor pertanian itu sendiri yang



Sumber: Riau dalam Angka, 2010. GDP (dalam juta Rupiah)

Gambar 3. Perbandingan PDRB Sektor Pertanian, Sektor Migas, dan Jumlah Masyarakat Miskin di Provinsi Riau Tahun 2009

dapat membuat hasil tidak nyata pada taraf tertentu. Hubungan antara PDRB sub sektor Pertanian dengan PDRB Migas, PDRB Industri maupun PDRB Jasa sebagaimana diperlihatkan dalam Tabel 9. menunjukkan beberapa variabel tidak nyata pada taraf tertentu. Hal ini diduga adanya pengaruh yang diberikan antar sektor maupun sub sektor, dengan fungsi:

$$GDP \text{ Sektor} = f(GDPMigas) \dots\dots\dots(9)$$

produktivitas kerja penduduk Riau. Ironisnya lagi, jika dibandingkan dengan lapangan usaha keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang paling tinggi produktivitas kerja dari sembilan lapangan usaha hanya mencapai 11,12 persen, dan 19,63 persen dari produktivitas pekerja Riau dari PDRB termasuk minyak dan gas. Sebagai ilustrasi kontribusi minyak dan gas dalam PDRB Riau sebesar 54,4 persen, yang lebih besar dari sumber pendapatan bukan minyak

Tabel 8. Dugaan Regresi PDRB Sub Sektor Pertanian dengan Kemiskinan

Peubah	Model-1	Model-2	Model-3	Model-4	Model-5	Model-6	Model-7	Model-8	Model-9
Konstanta	64.264,29 0,0000	68.823,98 0,0000	68.301,8 0,0000	58.887,33 0,003	58.051,32 0,0025	50.609,86 0,0151	13.338,22 0,6069	13.938,67 0,596	3.847,486 0,8826
Bahan Makanan	-0,11034 0,0584	-0,06262 0,3363	-0,05541 0,4904	-0,05234 0,5186	-0,0531 0,4961	-0,06015 0,4447	-0,04595 0,5436	-0,04848 0,5286	-0,05254 0,4823
Perkebunan		-0,02453 0,1387	-0,02359 0,1847	-0,03026 0,1561	-0,04301 0,047	-0,03174 0,2051	-0,02906 0,2266	-0,02753 0,2658	-0,02156 0,3726
Peternakan			-0,0184 0,876	-0,05358 0,6876	-0,14351 0,2903	-0,18137 0,2057	-0,1483 0,2823	-0,15324 0,2751	-0,18511 0,1798
Kehutanan				0,034143 0,5594	0,034532 0,5394	0,064037 0,3318	0,025607 0,6956	0,030983 0,6501	0,065939 0,3413
Perikanan					0,095962 0,0381	0,101849 0,0304	0,085575 0,0599	0,084361 0,0674	0,080364 0,073
Harga Beras						-1,28642 0,3834	-1,66693 0,2442	-1,39627 0,4036	-2,87967 0,1164
PDRB Industri								-0,00715 0,7483	-0,01807 0,422
PDRB Migas							0,01375 0,0359	0,014023 0,0361	0,013408 0,0392
PDRB Jasa									0,045914 0,0709
R ²	0,924809	0,928347	0,92838	0,928944	0,935781	0,936946	0,943437	0,943584	0,948165
Adj. R ²	0,905612	0,908097	0,90610	0,904721	0,911885	0,911424	0,918604	0,916786	0,921584

Sumber: hasil olah data menggunakan Eviews.

Produktivitas kerja pertanian sementara ini hanya mampu menghasilkan 43,15 persen dari

dan gas (45,5 persen). Dengan demikian, upaya peningkatan peranan ekonomi bukan minyak dan

Tabel 9. Dugaan Regresi PDRB Migas terhadap PDRB Sektor dan Sub Sektor Lainnya

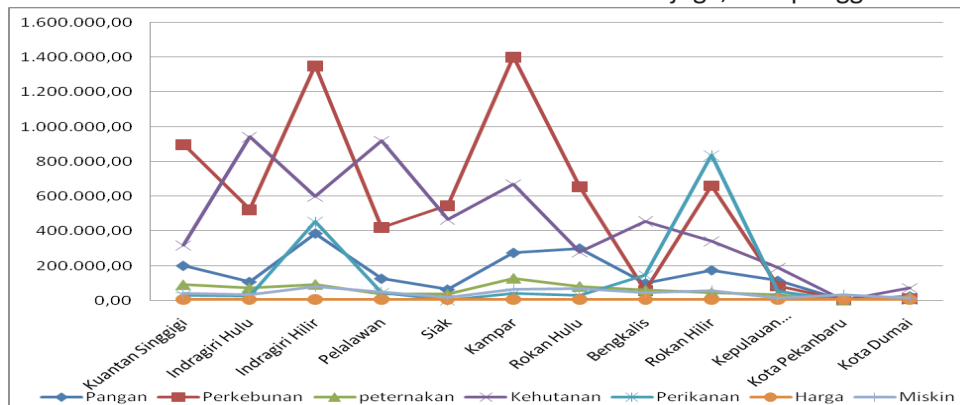
Variabel	PDRB Pertanian		PDRB Industri		PDRB Jasa		Sub sektor Kehutanan	
	Konstanta	Prob.	Konstanta	Prob.	Konstanta	Prob.	Konstanta	Prob.
GDPM	0,291785	0,002	0,2191	0,0007	0,105807	0,0187	0,075598	0,0008
C	11.2979,2	0,7396	-75.529,42	0,7441	-71.646,78	0,666	125.898,2	0,1224
R ²	0,981264		0,979816		0,970085		0,991642	
Adj R ²	0,97648		0,974662		0,962447		0,989508	
GDPM	0,010334	0,4861	0,138622	0,0151	0,014835	0,1565	0,052333	0,0254
C	111.711,9	0,0515	-46.455,68	0,8249	-1.082,844	0,978	-74.901,06	0,3886
R ²	0,970615		0,974839		0,845359		0,984371	
Adj R ²	0,963112		0,968415		0,805877		0,98038	

Sumber: hasil olah data menggunakan *Eviews*.

gas sebagai sektor yang dapat diperbaharui dan melibatkan banyak pekerja dalam ekonomi daerah Riau sangatlah perlu mendapatkan perhatian serius. Terutama pada sektor pertanian berwawasan agribisnis, yang lebih menekankan pada agroindustri sebagai kunci keberhasilan dengan mengutamakan peningkatan nilai tambah produksi pertanian primer sebagai bahan baku disamping memenuhi kebutuhan pangan daerah dan nasional.⁴⁰

teknologi pertanian tepat guna di lahan marginal dapat dipandang sebagai suatu langkah strategis dalam penanggulangan kemiskinan, mengingat di agro-ekosistem ini terkonsentrasi petani miskin.⁴¹

Pengeluaran pemerintah daerah yang dialokasikan dibidang infrastruktur (irigasi dan jalan) terbukti secara signifikan dapat mempengaruhi produktivitas pertanian dan jumlah penduduk miskin. Selain itu juga, efek pengganda terbesar pengeluaran



Sumber: Riau (Kabupaten/Kota di Provinsi Riau) dalam Angka, 2010 (diolah). GDP dalam Juta Rupiah.

Gambar 4. PDRB Sub Sektor Pertanian, Harga Beras, dan Kemiskinan Tahun 2009

Sebagian besar wilayah miskin berada pada zona agro-ekosistem lahan kering, pantai atau lahan rawa/lebak yang tergolong marginal, dengan karakteristik sebagai berikut : (1) penguasaan teknologi budidaya pertanian umumnya rendah, bahkan masih bersifat tradisional; (2) kurang berfungsinya lembaga-lembaga penyedia sarana produksi; (3) ketiadaan atau kurang berfungsinya lembaga pemasaran sehingga orientasinya bersifat subsisten; (4) rendahnya kualitas prasarana transportasi dan komunikasi yang berkaitan erat dengan rendahnya kepadatan penduduk, produktivitas kerja serta rendahnya *marketable surplus* hasil usaha tani. Oleh karena itu, upaya pemerintah dalam pengembangan

pemerintah daerah terhadap kemiskinan adalah melalui penyediaan sarana dan prasarana terutama infrastruktur jalan, *literacy rate*, dan irigasi. Dengan kata lain bahwa pemerintah memiliki peran yang besar dalam mengentaskan kemiskinan melalui sinergitas program kerja yang menyeluruh fokus pada pengembangan sektor pertanian.⁴²

⁴¹ Pantjar Simatupang, Dewa K. S. Swastika, Muhamad Iqbal, dan Iwan Setiadji, "Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Inovasi Teknologi Pertanian di Nusa Tenggara Barat", *Prosiding/Makalah Utama*, disampaikan dalam Seminar Nasional Pemberdayaan Petani Miskin di Lahan Marginal melalui Inovasi Teknologi Tepat Guna, Kementerian Pertanian, 2004.

⁴² Akbar Suwardi, "Pengeluaran Pemerintah Daerah, Produktivitas Pertanian, dan Kemiskinan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia (JEPI)*, 12(1), Juli 2011, hal. 39-55.

⁴⁰ *Op. Cit.*, Sulastri Surono, hal. 6.

Pembangunan tidak semata-mata diukur melalui kenaikan volume atau nilai produksi barang dan jasa yang secara otomatis akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun untuk mewujudkan kesejahteraan itu, harus ditempuh melalui proses pembangunan yang multidimensional. Terjadinya pergeseran paradigma yang hanya tertumpu pada aspek pertumbuhan ekonomi (*growth economic*) menuju pertumbuhan melalui pemerataan (*growth via equity*) merupakan langkah bijak untuk memihak kepentingan masyarakat yang miskin dan lemah.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Dugaan regresi PDRB Provinsi Riau terhadap jumlah penduduk miskin diperoleh hasil bahwa PDRB tidak berpengaruh nyata terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin.
2. Dugaan regresi untuk PDRB sektor pertanian secara nyata berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian adalah sektor yang perlu diprioritaskan karena secara nyata dan langsung dapat mengurangi jumlah penduduk miskin.
3. Harga beras berpengaruh negatif secara nyata terhadap prevalensi kemiskinan begitu juga dengan PDRB Pertanian namun tidak nyata, sedangkan PDRB Non Pertanian secara nyata berpengaruh positif terhadap prevalensi kemiskinan.
4. Menanggulangi kemiskinan melalui swasembada pangan bukan sekedar mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan tetapi mensinergikan target perekonomian yang ingin dicapai dengan potensi daerah dan kemampuan sumber daya manusianya. Tidak memaksakan merubah lahan yang ada dan bernilai ekonomis untuk dirubah menjadi lahan pertanian pangan sementara dukungan irigasi belum memadai. Mengedepankan pembukaan lahan-lahan baru yang belum dimanfaatkan, lahan tidur untuk mencetak lahan-lahan sawah baru dengan menggunakan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produksi pertanian.

B. Saran

1. Pemerintah perlu mencari solusi untuk mengatasi faktor-faktor penyebab penduduk yang bekerja pada sektor pertanian di perdesaan menjadi miskin yaitu: (1) sumber daya alam, lahan kurang subur, pendayagunaan lahan kurang produktif, degradasi lahan, kepemilikan lahan pertanian, pengalihan lahan,

(2) keterbatasan penguasaan dan penerapan teknologi dan unsur pendukungnya, (3) sumber daya manusia yang berkaitan dengan rendahnya pendidikan dan produktivitas kerja, dan (4) prasarana dan permodalan termasuk kelembagaan. Oleh karena itu Pemerintah harus berperan aktif dalam menjamin keberlangsungan sektor pertanian karena bukan saja mengurangi jumlah penduduk miskin namun juga menciptakan swasembada pangan dan menghilangkan ketergantungan dengan daerah lain.

2. Pemerintah perlu meningkatkan nilai jual petani pangan dengan memberikan kemudahan akses terhadap prasarana pertanian baik itu kepemilikan tanah pertanian, fasilitas irigasi, pengembangan teknologi pertanian, pemberian bibit unggul, pupuk dan pestisida, pemberian kredit, serta penyertaan tim penyuluh bahkan memberikan insentif bagi petani yang komitmen mengembangkan pertaniannya sehingga dapat meningkatkan jumlah produksinya dan memenuhi kebutuhan beras setiap tahun baik di daerahnya maupun Provinsi Riau secara keseluruhan.
3. Pemerintah harus menjaga agar kekayaan alam suatu daerah tidak hanya mendatangkan keuntungan bagi investor atau kelompok tertentu namun juga masyarakat daerah tersebut sehingga kekayaan alam yang dimiliki suatu daerah tidak sekedar menjadi "kutukan" sumber daya bagi daerah tersebut terutama ketika dikelola dengan tidak baik dan sudah tidak dapat dimanfaatkan kembali atau habis terpakai. Dengan demikian keunggulan sektor migas di suatu daerah akan berimplikasi pada penguatan sektor lainnya, apabila ada kebijakan yang menempatkan sektor migas sebagai pendukung sektor lainnya terutama sektor yang secara nyata erat kaitannya dengan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arsyad dan Lincolin. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE, Edisi Pertama, 1999.
- Blakely, E. J. *Planning Local Economic Development: Theory and Practice*. California: SAGE Publication Inc, 1989.
- Blancard, Olivier. *Macroeconomics*. New Jersey: Pearson International Edition, Fifth Edition, 2009.
- Case, E. Karl dan Fair, C. Ray. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Makro*. Jakarta: PT. Indeks, Kelompok Gramedia, Edisi 5, 2004.
- Faturcozman dan Molo. *Kemiskinan di Perdesaan Jawa, Population Studies Centre*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995.
- Fauzi, Noer. *Petani dan Penguasa; Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, Cetakan I, Agustus 1999.
- Jehle, A. Geoffrey dan Reny, J. Philip. *Advanced Microeconomic Theory*. Hampshire: Ashford Colour Press Ltd, Third Edition, 2011.
- John, D. Jonathan. *The Resource Curse, Theory and Evidence*. Spanyol: Elcano Royal Institute of International Studies dan Strategis, 2010.
- Kuncoro, Mudrajad. *Ekonomika Indonesia; Dinamika Lingkungan Bisnis di Tengah Krisis Global*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, Cetakan Pertama, Agustus 2009.
- Mohammad, J. H. *Membangun Pertanian: Sejarah, Demokratis dan Berkeadilan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009.
- Mankiw, N. Gregory. *Principles of Economics*. South Western: South Western of Thompson Learning Press, Third Edition, 2004.
- Naram, Dharma. *Agricultural Change and Rural Poverty: Variation in a Theme*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1985.
- Nicholson, W dan Snyder, C. *Microeconomic Theory; Basic Principles and Extensions*. United Kingdom: Thompson Learning Academic Resource Center, Tenth Edition, 2008.
- Sachiho, A. W. *Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Propinsi Riau: Sebuah Tafsiran Seputar Pemberdayaan Petani Kebun*. Tokyo: Komaba Studies in Human Geography, 2008, 19, Hal 7.

Todaro, P. Michael dan Smith, C. Stephen. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Jilid 2*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pertama, Edisi Kedelapan, 2003.

Widarjono, Agus. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Penerbit Ekonisia, Edisi, Ketiga 2009.

Jurnal:

- Febiyansah, Pangky Tri. "Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dalam Perspektif *Good Governance*: Analisis Empiris di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, LIPI, 18(2), 2010.
- Norton, W. Seth. "Economic Growth and Poverty: In Search of Trickle Down". *Cato Journal*, 22(2), 2002.
- Simatupang, P., Saktyanu D. "Produksi Domestik Bruto, Harga dan Kemiskinan: Hipotesis "Trickle Down" Dikaji Ulang". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, 2003.
- Santoso, B. dan Sushanta, M. "Poverty and Trickle Down: A Quantitative Analysis". *Chambridge Journal of Economics*, 32, 2007.
- Surono, Sulastri. "Kondisi Perberasan dan Kebijakan Perdagangan Beras di Indonesia". *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 2006, 2(2), Desember 2006.
- Suwardi, Akbar. "Pengeluaran Pemerintah Daerah, Produktivitas Pertanian, dan Kemiskinan di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 12(1), Juli 2011.
- Marliati, Sumardjo, Pang S. Asngari, Prabowo Tjitropranoto, dan Asep Saefuddin. "Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemandirian petani tanaman pangan beragribisnis di Kabupaten Kampar Provinsi Riau". *Forum Pascasarjana*, 33(3), Juli 2010.
- Yasin, F., Rifai, A., dan Maharani, E. "Agribisnis, Pangan dan Penanggulangan Kemiskinan di Riau". *Jurnal Perhepi*, 2010.
- Purwaningsih, Yunastiti. "Ketahanan Pangan: Situasi, Permasalahan, Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat". *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 9(1), Juni 2008.
- Komara, Asmara Hendra. "Strategi Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan di Provinsi Riau". *Jurnal Teroka*, 10(2), Agustus 2010.

Makalah:

Pantjar, Swastika, Iqbal dan Setiadji, "Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Inovasi Teknologi Pertanian di Nusa Tenggara Barat", Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Pemberdayaan Petani Miskin di Lahan Marginal melalui Inovasi Teknologi Tepat Guna, Departemen Pertanian, 2004.

Munif, Abdul. "Strategi dan Pencapaian Swasembada Pangan di Indonesia", Makalah disampaikan dalam FGD Kementerian Keuangan 22 Februari 2009.

Mubyarto. "Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia", Artikel Kemiskinan, Tahun II Nomor 2 April 2003.

Laporan:

Saefuloh, Asep Ahmad, dkk. *Strategi dan Kebijakan Pengembangan Sektor Pertanian dan Perlindungan-Pemberdayaan Petani*, Laporan Penelitian Kelompok Tim EKP, Jakarta: P3DI, 2011.

Majalah:

Hadiwigno, S. dan Pakpahan, A. "Identifikasi Wilayah Miskin di Indonesia". *Majalah Prisma*, LP3ES, 1993.

Laporan Utama. "Ironi Negeri Agraris Mengimpor Pangan". *Majalah GATRA* No. 27 Tahun XVIII, 10-16 Mei 2012.

Majidi, N. "Anggaran Pembangunan dan Ketimpangan Ekonomi antar Daerah". *Majalah Prisma*, LP3S, 1997.

Internet:

Namba, Anton, "Pendekatan Ekosistem dalam Penanggulangan Kemiskinan: Refleksi Penanggulangan Kemiskinan di Sulawesi Tengah". (http://www.ekonomirakyat.org/edisi_13/artikel_4.htm, diakses 11 Mei 2012).

Kuncoro, Mudrajad, "Keamanan Energi dan Pangan", Investor Daily, 14 April 2008. (http://www.investorindonesia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=53698).

Thaher, Soemardhi, Presentasi di Mahkamah Konstitusi untuk Judicial Review UU No.33 tahun 2004 tentang Dana Bagi Hasil Migas. (<http://www.forumkeadilan.com/forum-utama.php?tid=477>, diakses 11 Mei 2012).

"Operasi Pangan Riau Makmur menuju Swasembada Pangan". (<http://proriau.com/tokoh.php?act=full&id=4>, diakses 2 Juni 2012).

Dokumen Resmi:

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Indonesia Tahun 2009-2014

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, *Tingkat Kemiskinan Riau September 2011*, Januari 2012.

_____, *Berita Resmi Statistik, Produksi Pada, Jagung dan Kedelai*, No. 30/07/14/Th.XII, 1 Juli 2011.

_____, *Statistik Harga Eceran Perdesaan Provinsi Riau Tahun 2009*, Riau: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2010.

_____, *Statistik Padi Palawija Provinsi Riau Tahun 2009*, Riau: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2010.

_____, *Sensus Pertanian Riau*, Riau: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2003.

_____, *Kuantan Singgigi Dalam Angka*, Riau: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2010.

_____, *Indragiri Hulu Dalam Angka*, Riau: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2010.

_____, *Indragiri Hilir Dalam Angka*, Riau: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2010.

_____, *Pelalawan Dalam Angka*, Riau: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2010.

_____, *Siak Dalam Angka*, Riau: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2010.

_____, *Kampar Dalam Angka*, Riau: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2010.

_____, *Rokan Hulu Dalam Angka*, Riau: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2010.

_____, *Bengkalis Dalam Angka*, Riau, Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2010.

_____, *Rokan Hilir Dalam Angka*, Riau: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2010.

_____, *Kepulauan Meranti Dalam Angka*, Riau: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2010.

_____, *Pekanbaru Dalam Angka*, Riau: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2010.

_____, *Dumai Dalam Angka*, Riau: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2010.